

OMBUDSMAN BABEL TERIMA KUNJUNGAN KESEKJENAN DPR RI BAHAS REVISI UU 25 TAHUN 2009

Selasa, 28 Mei 2024 - kepbabel

Pangkalpinang - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bangka Belitung menerima kunjungan Kesenjangan DPR RI dalam rangka penguatan analisis Prolegnas Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman Babel, Selasa (28/5/2024). Pembahasan ini dalam rangka untuk mendapatkan pandangan dari Perwakilan Ombudsman Babel untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pelayanan publik di daerah, serta pengawasan selama ini.

Hadir dalam pertemuan Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI yang diwakilkan oleh Dewi Sendhikasari, Marfuatul Latifah, Anin Dhita, Poedji Poerwanti, dan Nurfadhilah Arini. Sedangkan dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Babel diwakili oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Syulby Yozar Ariadhy, Keasisten Pencegahan Agung Nugraha dan Asisten Pemeriksaan Laporan M. Fajar Asshiddiq.

Ombudsman Babel menyampaikan beberapa masukan terkait perubahan UU 25 Tahun 2009. Perubahan tersebut meliputi pengaturan sistem ganti rugi pelayanan publik, peningkatan standar pelayanan menyentuh pemerintah desa, sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan Tindakan Korektif, Rekomendasi, dan Saran Ombudsman, perlindungan Pelapor dan pihak terkait guna menjamin keamanan, keselamatan, dan hajat hidup yang merupakan hak-hak Pelapor atau pihak terkait, pengaturan pelayanan publik berbasis elektronik dan mekanisme pengawasan eksternal dari Ombudsman, dan penegakan pelayanan inklusif.

Dari masukan tersebut memperhatikan dari berbagai pengalaman lapangan Ombudsman Babel dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik. "Kami harap revisi UU 25 Tahun 2009 dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik terlebih lagi dengan adanya transformasi layanan digital kepada masyarakat, maka harus dikembangkan mekanisme dan sistem pengawasan eksternal salah satunya dari Ombudsman," ujar Agung.